

Formulasi Sinergi Kebijakan Lintas Kementerian: Studi Kasus Kebijakan Kelapa Sawit K2I (kemiskinan,kebodohan,dan Infrastruktur) Di Riau 2005-2010

Nama : Khairul Anwar
Fakultas : Sosial dan Ilmu Politik
Telp. : 0821 7253 0014

Model sinergisitas kebijakan yang ditemukan ini berangkat dari ide penelitian adalah bagaimana membuka ruang politik lebih luas antara pemerintah, masyarakat, dan swasta (PMS) dalam proses kebijakan. Secara empirik, inilah sumber konflik sosial-politik yang utama yang terjadi dewasa ini di Indonesia termasuk Riau. Ruang publik dimana didalamnya ada komunikasi timbal balik dan interaksi sosial. Model-model kebijakan publik yang ada selama ini paling tidak untuk perkebunan kelapa sawit, kelompok PMS dilibatkan ketika baru muncul masalah. Oleh karena itu, model ini melibatkan PMS sejak tahapan isu kebijakan, masalah kebijakan, dan formulasi kebijakan. Sehingga tindakan pemerintah mendapat legitimasi.

KEUNGGULAN PRODUK

1. Menumbuh kembangkan kesadaran kolektif bersama bahwa konflik berbeda dengan tindak-kekerasan. Konflik adalah kenyataan hidup. Kita semua alami konflik, besar atau kecil, tetapi tidak mesti melibatkan tindak-kekerasan. Kalau dikelola dengan efektif, konflik bisa positif dan konstruktif, yaitu membuka peluang terjadinya perubahan.
2. Harmonisasi hubungan antara pemerintah, masyarakat (lokal), dan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
3. Memperkuat sinergisitas negara dan masyarakat dalam konteks formulasi kebijakan publik yang pro rakyat

POTENSI APLIKASI

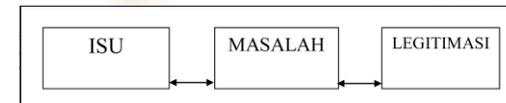
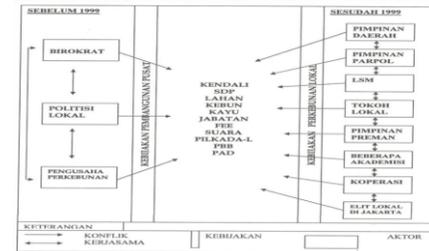
1. kerangka dasar yang terdiri dari tahapan identifikasi isu kebijakan, masalah, formulasi dan legitimasi kebijakan.
2. model ini mengetengahkan empat variabel ekonomi-politik utama yang seringkali menimbulkan ketegangan sosial-politik variabel tersebut adalah:
 - a. aktor, mengidentifikasi pola dan arah interaksi aktor-aktor yang “mendukung” atau yang “menolak” dalam wacana dan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Riau, dan menentukan apa yang menjadi tujuan dan kepentingannya.
 - b. menggambarkan proses preferensi masing-masing aktor mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit yang akan diterapkan di Riau
 - c. mendiskripsikan bagaimana para aktor berkoalisi dalam mencapai tujuan.
 - d. menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi para aktor berinteraksi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan untuk mencapai tujuan.

Tabel Identifikasi Aktor, Kepentingan, Basis Instusional, Sumberdaya Politik Terkait Isu Kebijakan Kelapa Sawit K21 2005-2010

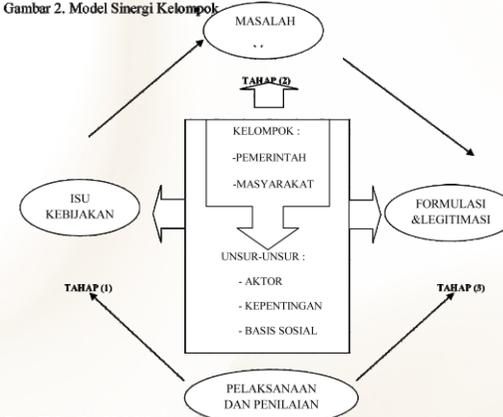
KELompok 1	KELompok 2		KELompok 3		
	MENDUKUNG	MENDUKUNG DGN SYARAT	MENOLAK		
	Pemerintah	Non Pemerintah	Non Pemerintah	Non Pemerintah	Non Pemerintah
Aktor Kepala Daerah Bupati, Camat, Kadis, Dikem, Hutan, LPH, Bk, Kantor Riprod, Disperindag.	Komisi A-B DPRD Riau, Chdr, Parlin, Jhar, PE, Gubernur GAKP, Bank Riau, Dapen, Ythim, Mirokat Bakel, PPN Miranito, BKS, B, Gipensi	Wan Ali, Iqbal Ika, Sah, Kadek Kadek Chaban Rama Rangk Ngan Rian, WWF PDI- PANS, Akerwic, Almadi.	FAKUSPP, PERLA Kubandak (KUB) Santik Jaya, TG, MA, TAR, Rama Rangk Ngan Rian, WWF PDI- PANS, Akerwic, Almadi.	Wan Ali, Kadek Kadek Chaban EEL Jah, Wokli, BELL, FARJAL, ALI, H, Iang, KAR, AMAR, KALIPTRA, Slitang Ali, H, B, Sah, L, L, Sah Rian, Mahasuswa UIR, Sanif Wach, Me pita Pylamita,	TR, Hutan Maudiri, PKS, PKM, A, EEL Jah, Wokli, BELL, FARJAL, ALI, H, Iang, KAR, AMAR, KALIPTRA, Slitang Ali, H, B, Sah, L, L, Sah Rian, Mahasuswa UIR, Sanif Wach, Me pita Pylamita,
Kepentingan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah kelapa sawit	Prinsip-prinsip dan pemertanian akan menarik laba dari produksi	Pemerintah dan dalam rangka mengorganisasi kembali	Pemerintah dan pendapa dan sejalan dengan pelaksanaan pembangunan	Pemerintah dan kepentingan masyarakat luas (keberlanjutan dan lingkungan)	Redistribusi aset dan perolehan politik masyarakat
Basis Institusional	Hirarksi	Blokus dan masyarakat	Hirarksi	LSM, akademisi, dan Parpol	Hirarksi
Sumber Daya Politik	Akses informasi dan pembantuan lapangan lokal	Penganda dan proses produksi, akses per lapangan, dan proses pembantuan lapangan	Kerjasama dan akses ke pemerintah	Akses jaringan ke Parpol, lembaga sosial, dan pemerintah	Akses ke Parpol, lembaga sosial, dan pemerintah

Sumber: analisis wawancara, dokumen, dan observasi, 2010

Tabel Pola interaksi aktor dalam formulasi kebijakan



Gambar 2. Model Sinergi Kelompok



Surat Kabar dan Majalah:

- Kompas, 25 Februari 2006
- Media Indonesia, 2 Februari 2006
- Riau Pos, 18 Mei 2005
- Riau Tribune, 3, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, September 2006
- Bahana Mahasiswa, 17 Juli 2006
- Tribune Pekanbaru, 27 Agustus dan 8 November 2007
- Riau Pos, 16 Juni 2010